

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal dalam sistem akuntansi memiliki peran penting karena pengendalian internal adalah prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merancang dan mengendalikan jalannya perusahaan, membantu memfasilitasi informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin taat hukum dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah salah satu sistem pengendalian di pemerintahan. Selain sistem pengendalian internal pemerintah terdapat sistem pengendalian eksternal pemerintah, pada sistem ini dilaksanakan oleh pihak eksternal diantaranya Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan lainnya. Sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Menurut Mahmudi (2016:251) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Bastian (2016:16) adalah:

“Suatu proses yang dijadikan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisien operasi.”

Menurut Tunggal (2013:24) adalah:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini; (a) efektifitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan pelaporan keuangan, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Putra (2019) adalah:

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik.”

Menurut Mailoor, dkk. (2017) adalah:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses pengendalian yang melekat pada kegiatan yang dilakukan pimpinan dan pegawai untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi.”

Adapun menurut Sari (2017) adalah:

“Sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

2.1.1.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintahan Menurut

Mahmudi (2016:253) terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. “Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan Pengendalian (*Monitoring Activities*).”

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun, sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan dengan

baik maka mampu membawa hal positif. Ada beberapa indikator dari lingkungan pengendalian diantaranya:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern pemerintah harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam yang meliputi:

- a. Identifikasi risiko.
- b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas,

dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasikan informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Kegiatan pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pemantauan pengendalian intern pemerintah pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan meliputi:

- a. Pemantauan atau evaluasi terpisah.
- b. Tindak lanjut.

Sama halnya dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut PP Nomor 60 tahun 2008, meliputi:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal.”

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan

perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif dan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam

- a. Menetapkan tujuan dalam identifikasi dan penilaian risiko.
- b. Identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan.
- c. Memulai risiko potensi penipuan.
- d. Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal (SPI)

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

- a. Memilih dan mengembangkan pengendalian atas mitigasi/usaha pencegahan risiko terhadap pencapaian tujuan.

- b. Pengembangan pengendalian atas teknologi terhadap pencapaian tujuan.
- c. Pengendalian melalui kebijakan yang diterapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

- a. Menghasilkan dan menggunakan kualitas informasi relevan.
- b. Mengkomunikasikan informasi untuk mendukung pengendalian internal.
- c. Komunikasi dengan pihak eksternal.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revid lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

- a. Memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi dan komunikasi di waktu tertentu.

Unsur-Unsur Pengendalian Internal juga dikemukakan oleh COSO yang dikutip oleh Arens (2008:376), yaitu:

1. "Pengendalian Lingkungan
Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.

2. **Penilaian Risiko**
Kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.
3. **Pengendalian Aktivitas**
Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagaimana seharusnya.
4. **Informasi dan Komunikasi**
Diperlukan untuk semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan sebelumnya.
5. **Monitoring**
Proses penilaian berkelanjutan dan periodik pelaksanaan internal apakah sudah terlaksana dengan baik dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal.”

Berdasarkan pada unsur-unsur pengendalian internal, maka dapat disimpulkan bahwa dalam instansi pemerintahan dapat dinyatakan baik apabila mampu memenuhi kelima unsur pengendalian internal tersebut.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Adapun Menurut Mahmudi (2016:252) yaitu sebagai berikut:

1. “Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Memberian jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah berlaku telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Menurut Susanto (2013:88) yaitu sebagai berikut:

1. “Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas akan dicapai
2. Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelwengan dan penggelapan

3. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa :

"Pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan."

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Agar mampu memberikan keyakinan sehingga tujuan yang dimiliki terlaksana maka sistem pengendalian internal pemerintah harus memuat prinsip didalamnya. Berikut merupakan uraian dari prinsip-prinsip pada sistem pengendalian internal pemerintah.

Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal pemerintah menurut Weygandt (2013:455), meliputi:

1. “Pembentukan Tanggung Jawab
2. Pemisahan Tugas
3. Prosedur dokumentasi
4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik
5. Verifikasi Intern Dependen”

Adapun penjelasan prinsip-prinsip pada sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tanggung Jawab

Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.

2. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem pengendalian intern, ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini yaitu:

- a. Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda.
- b. Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas aset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi. Dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (*prenumbered*), dan seluruh dokumen seharusnya dihitung. Dokumen merupakan sumber untuk jurnal akuntansi seharusnya diseerahkan dengan benar ke departemen akuntansi. Pengendalian ini membantu penjaminan pencatatan transaksi secara tepat waktu dan berkontribusi secara langsung untuk keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.

4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi untuk mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi juga melindungi aset.

5. Verifikasi Intern Dependen

Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal dependen:

- a. Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak.
- b. Verifikasi seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi terkait.

2.1.1.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Keterbatasan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah mampu memberikan keyakinan memadai bagi pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan. Pencapaian tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat sehingga sistem pengendalian intern pemerintah hanya berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dengan cepat dan menekan serendah mungkin masalah, kecurangan, kelalaian yang terjadi.

Keterbatasan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Effendi (2016:87) sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam keputusan (*judgment*), misalnya karena kurang informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain.
2. Macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai (*breakdown*).
3. Terdapat kolusi (*collusion*), misalnya kerjasama antar karyawan ataupun antar pegawai dengan pihak luar.
4. Manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri (*management override*).
5. Pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya (*cost versus benefits*).”

Kemudian keterbatasan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Bastian (2016:10) sebagai berikut:

1. “Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi, dapat dimanipulasi dengan kolusi.
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh pimpinan.
3. Personil atau pegawai keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, tidak diperhatikan, maupun kelelahan.”

Akibat dari adanya keterbatasan, maka dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah perlu memperhatikan tujuan yang akan diterapkan. Selain itu, pengendalian menjadi tidak efektif karena adanya kinerja pegawai yang rentan terhadap kesalahan pertimbangan atau interpretasi, kesalahpahaman, kelalaian, ataupun kecurangan.

2.1.2 Kajian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai capaian atau target, pelaksanaan program, usaha, dan juga kebijakan yang dilakukan untuk terlaksanannya visi, misi, dan tujuan dalam suatu kelompok maupun organisasi.

Kinerja menurut Mahsun (2016:25) adalah:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.”

Adapun aparatur pemerintah daerah menurut Supriatna (2012:32) adalah sebagai berikut:

“Aparatur pemerintah daerah yang berfungsi selaku perekat bangsa yang memenuhi standar profesional sesuai dengan kedudukan, jenjang dan jabatan atas dasar kompetensi, keahlian dan keterampilan pada lingkup jabatan struktural dan fungsional dalam organisasi pemerintahan guna mendukung sistem karier dan prestasi kerjanya”

Selanjutnya kinerja aparatur menurut Mangkunegara (2017:67) sebagai berikut:

“Kinerja aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

Dalam penelitian Dhiyavani (2017) sebagai berikut:

“Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah posisi kesuksesan atau kegagalan penyelenggaraan agenda sebagaimana tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah daerah sebagai penggambaran terkait tingkat perolehan sasaran atau tujuan sebagai pemaparan dari visi, misi, dan rencana instansi pemerintah”.

Menurut Mailoor, dkk. (2017) sebagai berikut:

“Kinerja aparatur adalah ukuran pelaksanaan pekerjaan aparatur dengan baik dan menunjukkan hasil.”

Menurut Ramadhan (2019) sebagai berikut:

“Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Moerdiono dalam Ruspina (2013) bahwa :

“Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden Republik.”

Aparatur merupakan perangkat pemerintah atau pegawai negeri yang bertanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut.

Dapat disimpulkan menurut pengertian di atas, kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hasil dari perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan rasa tanggungjawab, agar terciptanya kualitas kinerja yang baik dan optimal serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.2.2 Karakteristik Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Pada dasarnya setiap kinerja baik kinerja aparatur pemerintah maupun kinerja sumber daya manusia di luar pemerintah memiliki karakteristik agar hasil laporan dapat dinyatakan berkualitas dan kompeten.

Menurut Mahsun (2017:196), yaitu:

1. “Masukan (*input*)
2. Proses (*process*)
3. Keluaran (*output*)
4. Hasil (*outcomes*)
5. Manfaat (*benefit*)
6. Dampak (*impact*).”

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aparaturnya dapat berjalan dengan baik dalam konteks pelaksanaan kinerja adalah:

1. Masukan (*Input*) yakni semua hal yang diperlukan supaya penyelenggaraan acara dapat terkoordinir untuk menghasilkan keluaran. Dan menegaskan pada penilaian karakteristik pribadi pekerja dengan prestasi kerjanya. Karakteristik yang menjadi pertimbangan atas penilaian mencakup ketaatan, loyalitas, kejujuran, kreatifitas, adaptasi, disiplin, inisiatif, motivasi, sopan santun dan mempunyai komitmen.
2. Proses (*Process*) yang menyatakan bahwa organisasi merancang ukuran program dalam beberapa aspek seperti efisiensi dan efektivitas juga keakurasian pada penyelenggaraan acara tersebut. Rambu yang diprioritaskan adalah seberapa efisien dan ekonomis sebuah penyelenggaraan acara organisasi ataupun instansi. Seperti:
 - a. Kepatuhan pada kebijakan perundangan
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Keluaran (*Output*) yaitu apa yang dicita-citakan dapat diwujudkan dari sebuah kegiatan baik dalam bentuk fisik atau non-fisik. Indikator ini dimanfaatkan untuk menilai pengeluaran yang tercipta dari sebuah acara. Apabila dilakukan membandingkan keluaran, instansi dapat meninjau penyelenggaraan kegiatan apakah sesuai sebagaimana rancangannya. Seperti:
 - a. Jumlah kinerja atau jasa yang dihasilkan

- b. Kepastian dalam menghadirkan kinerja atau jasa.
4. Hasil (*Outcome*) adalah suatu hal yang menggambarkan fungsi dari keluaran pada acara dalam kisaran menangan (efek langsung). *Outcome* mendeskripsikan tingkat perolehan atas hasil yang meliputi urusan banyak pihak. Dengan indicator ini, organisasi bisa
- a. Nilai kualitas kinerja atau jasa yang tersedia
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Indikator yang memaparkan dampak dan perolehan kegiatan terhadap rakyat secara menyeluruh. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Misalnya:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah

Aparatur bertugas untuk melayani masyarakat dan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik dalam mencapai suatu kinerja. Tujuan untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan tidaklah mudah, tentu saja untuk mencapai kinerja maksimal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Mangkunegara (2012:67) yaitu sebagai berikut:

1. “Faktor Kemampuan
2. Faktor Motivasi”

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

3. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.

Selanjutnya menurut Mahmudi (2015:20) yaitu sebagai berikut:

1. “Faktor personal atau individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.

5. Faktor kontekstual atau situasional, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi.”

Salah satu hasil yang diharapkan dalam pemerintahan adalah hasil dari kinerjanya, untuk mengetahui hasil dari kinerja pemerintahan tersebut maka dilakukan sebuah pengukuran yang tentu saja memiliki tujuan.

Menurut Mardiasmo (2014:152) tujuan pengukuran kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. “Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan dan pencapaian strategi
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.”

2.1.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Aparatur Pemerintah

Pelaksanaan pengukuran kinerja pemerintahan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan kinerja yang dicapai oleh aparatur pemerintah pada satu periode yang telah ditentukan, selain itu pengukuran kinerja pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan dasar evaluasi untuk melakukan perubahan, penghapusan, dan perbaikan sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Mohamad Mahsun (2016:33) yaitu sebagai berikut:

1. “Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.”

Dengan demikian pengukuran kinerja dapat bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuan, karena melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 Pelaksanaan *Good government governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good government governance*

Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih demokratis, pemikiran tentang "*good government governance*" beriringan mulai berkembang atau pemerintahan (pengurusan pemerintah) yang baik. Pada umumnya *good government governance* berarti pemerintahan yang bersih, atau *clean government*. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pengertian menurut Mardiasmo (2018 : 22) *Good government governance* adalah :

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Selanjutnya *Good governance* menurut Tohardi (2015:15) yaitu:

“Pemahaman atas *Good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan public/pemerintahan (*good government governance*).”

Kemudian menurut World Bank dalam Mustafa (2013:187):

"*Good government governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha"

Good governance menurut Osborne dan Gaebler, 1992; Lundqvist, 2001

dalam Zeyn (2011):

“*Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, privat sector, and society*).”

Selanjutnya *Good governance* menurut Mailoor (2017) bahwa:

“*Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif untuk tujuan organisasi dengan menjaga sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.”

Dan adapun *Good government governance* menurut Sari (2017):

"*Good Government Governance* adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat."

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa *good government governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga, mensinergikan interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta, dan

masyarakat yang menjunjung tinggi keinginan (kehendak rakyat) dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Good government governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintah.

Dengan adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2018:32) mengemukakan prinsip-prinsip *good government governance*:

1. “Partisipasi (*Participation*)
2. Pengawasan (*Rule of law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Berkeadilan (*Equity*)
7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi Strategis (*Stratagic vision*).”

Adapun penjelasan dari pernyataan tersebut, sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar

kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Adapun indikator sebagai berikut:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengawasan (*Rule of law*)

Penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa panang bulu. Semua yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang diistimewakan, semua harus sama dimata hukum. Prinsip ini juga termasuk didalamnya hukum yang terkait dengan hak asasi manusia. Adapun indikator dari pengawasan, sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum dan perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam artian memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses informasi. Adapun indikator transparansi sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintah maupun harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik. Adapun indikator dari daya tanggap, sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Adapun indikator berorientasi consensus sebagai berikut:

- a. Penengah atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang terbaik dan prosedur.
- b. Ketersediaan dan kejelasan kebijakan dan prosedur.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya. Adapun indikator berkeadilan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan.
- b. Berkembangnya ekonomi masyarakat.

7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggungjawab. Terdapat pengawasan agar tercapai sebuah efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan napa yang telah ditetapkan.

- a. Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- b. Kegiatan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Para pengambil keputusan bertanggungjawab baik kepada lembaga maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan jenis organisasi yang bersangkutan. Agar apa yang telah dilakukan sebelumnya dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan.

- a. Pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran dan aktifitas yang dilakukan.
- b. Kejelasan fungsi bagian instansi dan pegawai.
- c. Kejelasan pelaksanaan setiap pelaksanaan instansi.

9. Visi Strategis (*Strategic vision*)

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan. Setiap kegiatan yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas bagi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita-cita masa depan.

- a. Kejelasan arah pembangunan daerah yang direncanakan.
- b. Konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Menurut Agoes (2011:101) Prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan *Good governance*:

1. “Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).”

Berikut penjelasan dari pernyataan tersebut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah, dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat

waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stockholder*).

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibilitas juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

4. Independensi (*Independency*)

Demi kelancaran pelaksanaan *Good Government Governance*, instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas jumlah dari satu institusi prinsip mengenai pemerintahan yang jujur satu pakar ke yang sangat bervariasi ke perangkat lain, dari melandasi lainnya. Penelitian ini, disederhanakan menjadi prinsip-prinsip utama yang ada untuk fokus penelitian ini berpedoman dari empat prinsip utama *good government governance* seperti diutarakan oleh Sedarmayanti, antarlain partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan transparansi. Empat prinsip utama yang diutarakan oleh Sedarayanti oleh sebab itu prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip umum dari prinsip-prinsip yang diutarakan ahli dan lembaga lain. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip tersebut dipilih dikarenakan sudah sesuai dengan kondisi yang akan diteliti.

2.1.3.3 Manfaat *Good government governance*

Pelaksanaan *Good Government Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum.

Dengan melaksanakan *Good government governance* menurut Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

1. “Meminimalkan *agency cost*
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan
3. Memperbaiki citra pemerintahan”

Adapun penjelasan kutipan sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.

3. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan *good government governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good government governance* akan dirasakan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu pendukung berkembangnya kelola pemerintahan. Manfaat lainnya juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi

nilai tambah serta meningkatkan kinerja pemerintah untuk menghadapi permasalahan.

2.1.3.4 Tujuan *Good government governance*

Good government governance menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good government governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Tujuan dari *Good Governance* menurut Tunggal (2012:40) adalah :

1. "Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik,
3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat,
4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan."

Penerapan pelaksanaan prinsip *good government governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Good Government Governance*

Dalam Yuanida (2011) dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *good government governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governnce*, yaitu:

1. "Faktor Manusia Pelaksana (*Man*),
2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*).
3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*).
4. Faktor Peralatan (*tools*),
5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)".

Penjelasan dari beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good government governance* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good government governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good government governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good government. governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*),
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuation participation*);
 - c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*).
 - d. Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*).
3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good government governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

4. Faktor Peralatan (*tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good government governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good government governance*.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good government governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good government governance* dapat terwujud.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan <i>Good governance</i>	Rusnadia Wafa, Yesi Mutia Basri, dan Desmiyawati. (2020)	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Implementasi <i>Good governance</i> .
2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap <i>Good Governance</i>	Ghina Adhha Haura, Afrah Junita, dan Tuti Meutia. (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good governance</i> (2) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Good governance</i>
3.	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah	Siti Indah Dhiyavani,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1)

	Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	Azwir Nasir, dan Sem Paulus (2017)	Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> (2) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> (3) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> (4) Kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> .
4.	Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap <i>good governance</i>	Erliyanti, Rahma Yuliani, dan Hamdani (2022)	Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap <i>good government governance</i> dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Sedangkan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap <i>good government governance</i> dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan.
5.	Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Agung Kurniawan,dkk. (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha untuk melakukan manajemen sumber daya ASN melalui proses pengembangan database kepegawaian, penataan dan redistribusi pegawai, penyusunan standar kompetensi dan pengembangan diklat berbasis

			kompetensi. Upaya tersebut memberikan hasil yang cukup baik yang dilihat dari capaian.
6.	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	Jefri Herbert Mailoor, Jullie J. Sondakh, Dan Hendrik Gamaliel (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika aparatur sipil negara mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil kerja yang rapih, minim kesalahan sesuai dengan sasaran kerja yang telah dibuat maka akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga kinerja aparatur mendukung penerapan <i>good governance</i> . Hasil penelitian ini bahwa jika pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen dalam pelaksanaan SPIP secara optimal sesuai dengan ketentuan maka akan mendukung terwujudnya <i>good governance</i> .
7.	Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Upaya Penerapan <i>Good Governance</i>	Ginangar Shaum Ami Putra (2016)	Pengendalian internal akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat Kabupaten Sorong selatan.
8.	<i>Effect of Human Resource Competencies,</i>	Nurmiati Irvan, Abdul Rahman Mus,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem

	<i>Information Technology and Internal Control Systems on Good government governance and Local Government Financial Management Performance</i>	Muhammad Su'un, Mukhlis Sufri (2017)	pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.
9.	<i>The Influence of Performance of Local Government, Financial Management, The System of Internal Control, Implementation of Government Accounting Standards, Parliamentary Supervision, and Organizational Culture Implementation of Good government governance</i>	Sigit Arie Wibowo dan Firdiani Meitia Indeswari (2019)	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi sistem akuntansi pemerintahan, dan pengawasan parlemen berpengaruh positif terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
10.	<i>The Effect of Implementation of Government Accounting Standard, Government Internal Control System and Accounting Information System on Good government governance Requirement with the Quality of Financial Statement as Moderation of Government Working Unit (SKPA) In the Government of Aceh, Indonesia</i>	Reza Alfarisi, Nadirsyah, and Muslim A. Djalil (2020)	Fungsi pengendalian internal yang tepat lebih banyak digunakan dan diterapkan secara sinergis untuk mencapai tata kelola yang baik di sektor publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan kata lain, fungsi audit internal akan meningkatkan tata kelola yang baik (Kewo & Afiah, 2017). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan good government governance pada SKPA Pemerintah Aceh dipengaruhi secara parsial dan simultan

			oleh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan.
11.	<i>The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good governance</i>	Nunuy Nur Afiah, Peny Cahaya Azwari (2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal memberikan pengaruh yang lebih baik, signifikan, dan positif terhadap tata kelola yang baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap

Pelaksanaan *Good Government Governance*

Keberhasilan penerapan *good government governance* tidak terlepas pada peranan sistem pengendalian internal pemerintah yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kelalaian dari pihak manapun.

Dalam Sedarmayanti (2016), dengan mengembangkan sistem pengendalian intern pemerintah, telah tercapai tata kelola pemerintahan yang baik, dilihat dari terpenuhinya visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah, keandalan laporan keuangan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, dan berkurangnya peluang korupsi, serta berkurangnya penyalahgunaan wewenang.

Sebagai penurunan korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam UNDP (2011) memaparkan bahwa tujuan penerapan SPIP di instansi pemerintahan adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (PP Nomor 60 Tahun 2008). Hal ini selaras dengan amanat PBB (*United Nations*) terkait pentingnya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan setara.

Menurut Mailoor, dkk (2017) dalam penelitiannya, bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) meliputi lima elemen untuk memberi jaminan bahwa sasaran pengendalian internal telah dipenuhi. Dengan diterapkannya pengendalian yang efektif, maka informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah akan handal, relevan, dan sesuai aturan yang berlaku sebagai wujud komitmen pemerintah membangun *good government governance*.

Menurut Dhiyavani (2017) dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan terciptanya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Harus diakui bahwa saat ini *good government governance* masih belum terlaksana di Indonesia. Jika dilihat dari sisi akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *good government governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi

keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian Erliyanti, dkk (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi *good government governance*. Untuk dapat mewujudkan *good government governance* maka dapat diimbangi dengan pengendalian internal yang optimal. Aktivitas pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan dari pengendalian internal. Selain itu, tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *good government governance*.

Menurut penelitian Ruspina (2013) menjelaskan bahwa dalam pewujudan pada pelaksanaan *good government governance*, pemerintah memerlukan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang mencukupi untuk membantu setiap kegiatan di lingkungan pemerintahan dan diharuskan untuk penerapan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.2.2 Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Government Governance*

Keberhasilan penerapan *good government governance* salah satunya dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah yang bekerja dengan rasa tanggungjawab dan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien sehingga sejalan dengan prinsip *good government governance* itu sendiri.

Dalam Sedarmayanti (2016:103) pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan proses transformasi dalam peningkatan kualitas SDM aparatur, dimana salah satu tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sesuai kebutuhan organisasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.

Menurut Dhiyavani (2017) dalam penelitiannya, reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan untuk membangun aparatur negara yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan adanya peningkatan kinerja aparatur karena pembangunan aparatur mampu meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kinerja menjadi isu sentral terkait dengan *good government governance*. Kinerja pemerintah selalu terkait erat dengan perilaku kerja aparatur karena perilaku tersebut merupakan tindakan yang akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan.

Menurut Mailoor, dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja aparatur merupakan ekspresi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yang menunjukkan kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya dan dipengaruhi oleh kemampuan dan sikap yang dimilikinya. Isu sentral dari pelaksanaan otonomi

daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *good governance*. Dengan menerapkan *good governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintahan yang baik, kondusif, responsif, dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *good governance*.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ruspina (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan *Good governance* bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah akan mempengaruhi *Good governance*, karena dengan adanya aparatur pemerintah yang berkualitas dan kompetitif maka penerapan prinsip-prinsip *Good governance* bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, aparatur pemerintahan daerah dituntut harus memiliki tingkat pendidikan, kedisiplinan dalam penyelesaian tugas, dapat bekerja dalam tim, dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, dan lain sebagainya. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya kinerja aparatur yang baik penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pembangunan.

2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Pelaksanaan *Good Government Governance*

Pelaksanaan *good government governance* akan berjalan baik apabila sistem pengendalian internal pemerintahnya sudah berjalan dengan baik pula, dan

dengan kinerja aparatur pemerintah yang kompeten, profesional dan bertanggungjawab juga akan saling berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam Mardiasmo (2018:32) mengemukakan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberikan pelaksanaan *good government governance* yang sesuai kepada para pegawai, serta mengeluarkan biaya monitoring, sedangkan untuk hasil monitoring yang baik, diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif. Cara untuk mengatasi permasalahan seharusnya pimpinan suatu entitas melaksanakan kegiatan suatu entitas dengan benar karena masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi.

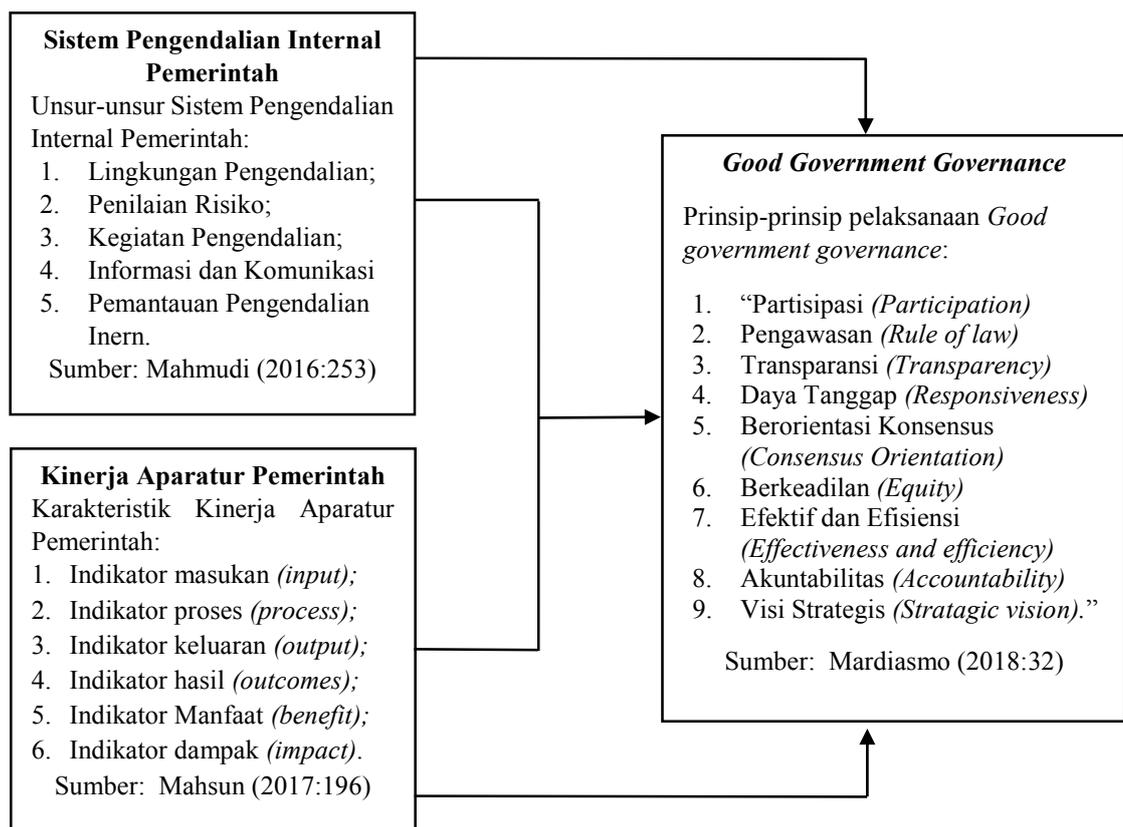
Menurut Dhiyavani (2017) dalam penelitiannya, semakin baik pengendalian internal, dan kinerja aparatur pemerintah maka semakin baik pula *good governance* yang diterapkan. Hal tersebut berarti dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan terciptanya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif, dan adaptif dapat menghasilkan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

Dalam penelitian terdahulu oleh Mailoor, dkk (2017) menyatakan dengan diterapkannya pengendalian intern yang efektif, maka informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah akan handal, relevan dan sesuai aturan yang berlaku sebagai wujud komitmen pemerintah membangun *good governance*. Dan kinerja aparatur merupakan ekspresi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yang menunjukkan kualitas dan kuantitas hasil kerja yang

dicapai oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya dan dipengaruhi oleh kemampuan dan sikap yang dimilikinya. Isu sentral dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *good governance*.

Berdasarkan beberapa teori penghubung dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan *good government governance*.

Dari uraian di atas, dapat disusun skema kerangka pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya peneliti mencoba mengemukakan sebuah hipotesis.

Pengertian menurut hipotesis menurut Sugiyono (2019:99) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

- H1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good government governance*.
- H2: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good government governance*.
- H3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good government governance*.